

**Analisis Yuridis Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Permohonan  
PKPU yang Didasarkan pada Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan Nomor  
43/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Medan)**

**ABSTRAK/ABSTRAC**

**Winda Agave Tampubolon**

**223309010057**

**Cinta Angel Christiani Br. Silalahi**

**223309010048**

*Abstract*

*The completion of construction projects often results in breach of contract, where one party fails to fulfill its contractual obligations. Determining breach in construction disputes is challenging due to the interdependent nature of obligations between the parties. The principle of exceptio non adimpleti contractus allows a party to suspend performance if the other party has not fulfilled its obligations, and it is frequently used as a defense in payment-related disputes. The dispute between PT Labersa Hutahaean and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk concerning the construction of the Labersa Toba Hotel project was brought into the process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). PKPU, as regulated under Law Number 37 of 2004, aims to provide an opportunity for debtors experiencing financial difficulties to propose a composition plan to creditors, thereby avoiding bankruptcy. This research highlights the legal challenges in applying the principle of simple evidence in PKPU proceedings when disputes arise from breach of contract. It aims to analyze the legal framework of PKPU, the application of simple evidentiary principles in the commercial court, and the judges' considerations in Decision Number 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan. Furthermore, this study seeks to contribute to the development of bankruptcy and PKPU law by providing clearer limitations on the use of PKPU in construction contract disputes. This research employs a normative legal research method, analyzing primary and secondary legal materials, and utilizes a qualitative approach to interpret legal norms and court decisions. The study concludes that the resolution of contractual disputes through PKPU petitions emphasizes the importance of simple evidentiary requirements.*

**Keyword:** *Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Simple Proof, Breach of contract, Construction contract, Commercial court.*

## ABSTRAK

Penyelesaian proyek konstruksi sering mengakibatkan wanprestasi, di mana satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Menentukan wanprestasi dalam konstruksi menjadi tantangan karena sifat kewajiban yang saling bergantung, Prinsip Exceptio non adimpleti contractus memungkinkan suatu pihak untuk menunda pelaksanaan jika pihak lain belum memenuhi kewajibannya, yang sering digunakan sebagai pembelaan dalam perselisihan terkait pembayaran. Sengketa antara PT Labersa Hutahaean dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terkait proyek pembangunan hotel labersa toba, yang diarahkan ke proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bertujuan memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membuat rencana perdamaian dengan kreditor sehingga menghindari kebangkrutan. Penelitian ini menyoroti tantangan hukum dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam PKPU ketika sengketa timbul dari wanprestasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan PKPU, Penerapan pembuktian sederhana di pengadilan niaga, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Medan. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan hukum Kepailitan dan PKPU, memberikan batasan yang jelas untuk penggunaan PKPU dalam perselisihan Kontrak Kontruksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, dan kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan putusan pengadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan kontraktual dalam pengajuan Permohonan PKPU menekankan pentingnya bukti yang sederhana.

**Keyword: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pembuktian Sederhana, Wanprestasi, Kontrak Jasa Konstruksi, Pengadilan Niaga.**